

Analisis Penyusunan Rencana Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BPPRD-SU

Widya Rizky Amelia¹ Muhammad Ikhsan Harahap, M.S.I ²

Program Studi Manajemen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

widyarizkyamelia@gmail.com ,

ABSTRACT

The work plan is referred to as a process that has the potential to achieve the results to be achieved over the next one year while taking into account the potential, opportunities and constraints that may or may arise, the work plan includes the vision, mission, strategy, goals and objectives of an organization, and also about the main tasks and functions of the organization, as well as programs and activities that include work plans that will be carried out within one year, the preparation of a work plan is the implementation of a planning concept that plays a role in the organizational managerial process as a determining factor for the success of achieving goals and objectives as well as achieving the vision and mission of an organization. organization. Preparation of the Work Plan at the Regional Tax and Levy Management Agency of North Sumatra Province, compiled from the Minister of Home Affairs No. 86 of 2017 concerning the method of Programming, Regulation, and Regional Development Assessment, procedures for Assessing the Concept of Regional regulations regarding the concept of long-term development, the concept of development regional middle time and the concept of regional ruler activities. The concept of this activity is based on the estimation and progress of the strategic environment, both internal and external, which greatly influences the implementation and management of regional levies. The work plan includes the vision, mission, goals, policies, programs and activities to be carried out within one year. Based on the identification and pressing problems and with reference to the income of capabilities in the achievement of strategic plan performance and synergy with national policies, so that the objectives and targets for the acquisition of the Regional Tax and Levy Management Agency of North Sumatra Province in the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) must create target capability of the proposed activity in its budget. The delegation of power is not only the right to use the budget, but also has implications for the role. Associated with financial data, SKPD must always recognize how many public budgets have been entered.

Keywords: work plan, development control and evaluation, regional revenue administration.

ABSTRACT

Rencana Kerja disebut dengan proses yang berpotensi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan dengan tetap memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang atau yang mungkin akan timbul, rencana kerja meliputi visi misi, strategi, tujuan dan sasaran suatu organisasi, dan juga tentang tugas pokok dan fungsi organisasi, serta program dan kegiatan yang meliputi rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, penyusunan rencana kerja merupakan pengimplementasian konsep perencanaan yang berperan dalam proses

manajerial organisasi sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran serta tercapainya visi dan misi suatu organisasi. Penyusunan Rencana Kerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, disusun bersumber pada permendagri No 86 Tahun 2017 mengenai metode Aturan Pemograman, Pengaturan, serta Penilaian Pembangunan Wilayah, tata cara Penilaian Konsep peraturan Wilayah mengenai Konsep pembangunan jangka waktu yang panjang, konsep pembangunan waktu menengah wilayah serta konsep kegiatan penguasa wilayah. Konsep Kegiatan ini disusun bersumber pada estimasi dan kemajuan lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun eksternal yang sangat mempengaruhi dalam penyelenggaraan serta pengurusan pungutan wilayah. Rencana kerja mencakup visi, misi, tujuan, kebijaksanaan, program serta aktivitas yang akan dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Bersumber pada identifikasi serta permasalahan yang menekan dan dengan merujuk pada pendapatan kemampuan pada pencapaian kinerja rencana strategis serta sinergitas dengan kebijaksanaan nasional, hingga tujuan serta target penajaaan akuisisi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menciptakan sasaran kemampuan dari usulan aktivitas di anggarannya. Pelimpahan kuasa itu tidak cuma hak untuk menggunakan anggaran, tetapi pula berimplikasi pada bagian peranan. Terpaut dengan data finansial, SKPD wajib senantiasa mengenali berapa anggaran publik yang sudah masuk.

Kata kunci : Rencana Kerja, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyelenggaraan Pendapatan Daerah.

PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan dukungan pemerintah memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta memberikan diskresi dalam penetapan tarif pajak, badan pengelolaan ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta pengkoordinasian pengelolaan anggaran pendapatan pajak dan retribusi dan pengelolaan data dan informasi wajib pajak dan objek pajak serta subjek pajak.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku badan yang mempunyai kewajiban dan tugas yang fungsinya dalam aspek pemungutan pajak Daerah serta pengurusan finansial, hingga aktivitas yang diperoleh merupakan tercapainya sasaran pemasukan daerah dan pengurusan finansial yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan begitu pastinya Badan Pengurusan Pajak serta Pungutan Wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan cara khusus yang terletak pada kebijaksanaan serta prioritas dalam pembangunan nasional. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negara No 54 Tahun 2010 mengenai Penerapan Peraturan Penguasa No 8 Tahun 2008 mengenai Jenjang, tatacara Kategorisasi, Pengaturan serta Penilaian Penerapan Konsep Pembangunan Wilayah mencakup jenjang, aturan metode kategorisasi, pengaturan serta penilaian penerapan konsep Pembangunan Wilayah terdiri atas: Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, adalah RPKD tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023 yang merupakan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Searah dengan perihal diatas, peraturan Menteri dalam Negara No 86 Tahun 2017 mengenai metode pemograman, pengaturan serta penilaian pembangunan wilayah, serta aturan metode penilaian konsep peraturan mengenai konsep pembangunan jangka panjang wilayah serta konsep pembangunan waktu menengah wilayah dan tata cara rencana kerja pemerintah, konsep kegiatan pula menata mengenai konsep yang memuat program serta aktivitas yang dibutuhkan mencapai target pembangunan. Program itu dipaparkan sesuai dengan kebijaksanaan perangkat daerah yang bermuatan aktivitas pendukung yang menciptakan output dalam rangka hasil suatu program.

DATA DAN METODOLOGI

Metode penelitian dan Tata cara riset merupakan tahap yang dipunyai serta dicoba oleh periset dalam bagan untuk mengakulasi data ataupun informasi dan melaksanakan analitis atau variebel pada informasi yang sudah diperoleh. Penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Data tersebut di dapat dari buku dan jurnal dirangkum oleh peneliti dari sumber yang tersedia menjadi penelitian yang berjudul Penyusunan Rencana Kerja SKPD Data ini termasuk data kualitatif yaitu data yang disajikan dengan kata-kata yang diperoleh dari berbagai pengumpulan data dari analisis dokumen, sumber buku. Data ini dapat dikelompokkan berdasarkan kategori atau sumber yang ada menjadi pengelompokan yang sempurna yang bersumber dari data yang ada lalu dikelompokkan dan dianalisis menjadi hasil penelitian ini.

Metode dan tata cara penelitian atau riset deskriptif bagi Sugiyono 2018 merupakan sesuatu riset yang dilakukan untuk mengenali nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih(bebas) tanpa membuat analogi ataupun mengaitkan dengan variabel lain. Maksudnya riset ini hanya memfokuskan pada pengenalan bagaimana kondisi variabel itu sendiri tanpa terdapat akibat ataupun ikatan kepada variabel lain semacam riset penelitian ataupun hubungan. Riset ini mempunyai tujuan untuk menarangkan dengan cara khusus sesuatu insiden yang terjalin di warga, riset ini menarangkan serta berupaya menanggapi kasus yang terjalin berdasarkan data- informasi yang telah terdapat dengan metode menyuguhkan, menganalisa, serta menginterprestasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Kerja

Menurut Husein Umar (2009:65) “Rencana kerja adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan, maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus

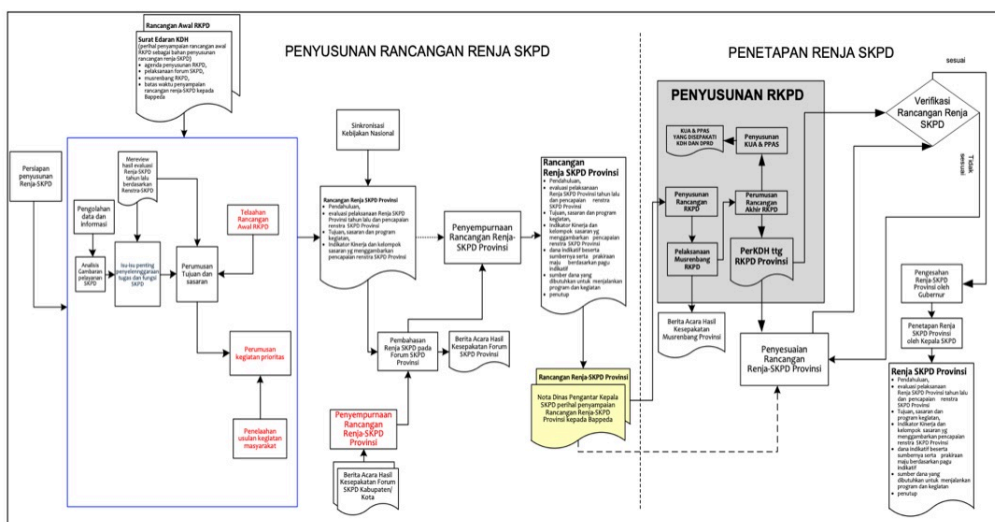
diimplementasikan. Karena perencanaan atau rencana kerja adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.”

Penyusunan Rencana Kerja dalam sesuatu badan hendaknya dilakukan setelah pemograman perencanaan di tingkat golongan target dan sasaran yang telah usai dilakukan. Perencanaan yang dicoba dalam sesuatu badan organisasi guna mendukung seluruh program yang hendak dilakukan di lapangan, misalnya terpaut sumber daya manusia yang mencakup staff yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di lapangan. Rencana Kerja badan organisai hendak lebih meningkatkan keadaan guna memenuhi keinginan program dan perencanaan yang akan di lakukan. Proses Penyusunan Rencana Kerja dalam badan organisai seharusnya diiringi oleh seluruh sumber daya manusia yang mampu bertanding dalam perencanaan yang akan dilaksanakan. Yang mana harapan, kritik serta anjuran ataupun impian dari seluruh sumber daya yang berfungsi amat berarti dalam menolong dan sebagai pendukung badan organisai dalam memastikan kebijaksanaan penting yang konkretisasi dari proses sesuatu perencanaan Rencana Kerja.

Rencana Kerja yang meliputi program serta aktivitas Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang disusun merujuk kepada visi misi dan tujuan serta target dan isu- isu penting yang berikutnya dituangkan dalam Kegiatan Rencana Kerja. Disusunnya Kegiatan Rencana Kerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam bentuk memenuhi amanat 143 Peraturan Menteri Dalam Negara No 86 tahun 2017 yakni sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun (RKA) Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Sebaliknya tujuan disusunnya Rencana Kerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara antara lain, menyediakan dokumen pemograman tahunan badan kepengurusan pajak serta retribusi daerah yang menjamin kesesuaian antara program, aktivitas, posisi aktivitas, kelompok sasaran, dan prediksi maju yang disusun dalam rancangan awal rencana kerjan pada perangkat daerah, terwujudnya program, aktivitas serta sugestif rencana kerja yang selaras dengan peraturan Kepala daerah mengenai Konsep Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah



Penyusunan Rencana Kerja merupakan kegiatan pengimplementasian rancangan pemograman, pemograman mempunyai kedudukan berarti dalam semua cara administratif sesuatu badan, yang sudah memutuskan pemograman selaku aspek determinan kesuksesan serta pendapatan yang bertujuan pada target badan yang berhubungan perencanaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses manajerial dalam suatu organisasi, yang menetapkan perencanaan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan dan pencapaian serta sasaran suatu organisasi. Perencanaan ini harus dilaksanakan mengingat teridentifikasi ketidakpastian dampak akibat pengaruh dinamika lingkungan yang hendak dialami. Pemograman ini merupakan salah satu cara dan proses yang melibatkan ketetapan ataupun opsi penggunaan sumber daya yang terdapat untuk menggapai tujuan tertentu yang akan terjadi di waktu yang akan datang.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai visi misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan Administrasi Kantor

Program ini selaku alat pendukung penerapan semua program serta aktivitas yang mana kebijaksanaannya mengarah pada kenaikan mutu jasa kualitas prima pada aspek administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini merupakan terwujudnya sesuatu pelayanan administrasi perkantoran yang cocok dengan jasa prima serta kenaikan pengerjaan administrasi barang milik daerah. Aktivitas dari program ini ialah aktivitas tradisi penerapan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang terdiri dari alat serta infrastruktur selaku pelaksanaan jasa administrasi perkantoran.

SKPD : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu

No	Kode Rekening	Usunan/Bidang Usan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju 2020	
					Target Capaian	Sasaran	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4 6 6 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provsu	20%	Memantapkan Kinerja SDM dan Kelembagaan	95,999,325,390	PAD	20%	108,169,882,115
1	4 6 6 1 1	84 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Provsu	180000 eka	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	520,000,000	PAD	180000 eka	1,000,000,000
2	4 6 6 1 1	85 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provsu	12 bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,482,750,000	PAD	12 bulan	9,000,000,000
3	4 6 6 1 1	86 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Provsu	200 unit	Meningkatnya Umur Ekonomis Kendaraan Dinas/Operasional	4,499,992,840	PAD	200 unit	5,000,000,000
4	4 6 6 1 1	89 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Kepuasan	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran/Kepuasan	Provsu	500 orang	Terselesainya Tugas-tugas Administrasi Perkantoran	16,250,000,000	PAD	500 orang	16,500,000,000
5	4 6 6 1 1	76 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Provsu	325	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	13,149,100,000	PAD	325	14,000,000,000
6	4 6 6 1 1	71 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Provsu	12 bulan	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	8,999,986,760	PAD	12	10,000,000,000
7	4 6 6 1 1	97 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Provsu	12 bulan	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	5,418,074,650	PAD	12	5,959,882,115
8	4 6 6 1 1	73 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provsu	12 bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	499,848,380	PAD	12 bulan	1,000,000,000
9	4 6 6 1 1	74 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provsu	1 Dinas 35 UPT	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	19,999,865,760	PAD	1 Dinas 35 UPT	24,000,000,000
10	4 6 6 1 1	75 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provsu	12 bulan	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur	499,990,000	PAD	12 bulan	1,100,000,000
11	4 6 6 1 1	78 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Provsu	12 bulan	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	49,995,000	PAD	12	110,000,000
12	4 6 6 1 1	80 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Provsu	8 Kali	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	891,872,000	PAD	8 Kali	900,000,000
13	4 6 6 1 1	93 Penyediaan Jasa Pengamanan	Tersedianya Jasa Pengamanan	Provsu	325	Terpeliharanya Keamanan Kantor	11,000,000,000	PAD	325	11,500,000,000
14	4 6 6 1 1	84 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Provsu	12 kali	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	2,199,900,000	PAD	12 kali	4,000,000,000
15	4 6 6 1 1	95 Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	Lancarnya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	Provsu	12 bulan	Lancarnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	999,950,000	PAD	12 bulan	1,100,000,000
16	4 6 6 1 1	96 Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor dan Tempat	Tersedianya Jasa Sewa Gedung Kantor dan Tempat	Provsu	22 gerai /gedung	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,538,000,000	PAD	22 gerai /gedung	3,000,000,000

2. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Bimbingan kebijaksanaan dari program ini adalah efektifitas serta efisien dalam penerapan aktivitas SKPD secara transparan serta bertanggung jawab yang terhidang dalam suatu cara manajemen. Yang sesuai dengan arah kebijaksanaan serta strategi yang hendak dicoba hingga indikator hasil yang diharapkan dari program ini merupakan tersusunnya informasi penerapan semua aktivitas dengan cara periodik yang terukur serta mampu memprediksi situasi sesungguhnya mengenai indikator kesuksesan serta kekalahan dalam penerapan aktivitas.

VI	4 6 6 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provsu	20%	Mengembangkan dan Memantapkan Kinerja Organisasi	5,148,325,363	PAD	20%	6,127,965,660
1	4 6 6 1 6	29 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tahisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Tahisar Realisasi Kinerja SKPD	Provsu	1 kali	Terbnyanya Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran	75,789,920	PAD	1 kali	83,369,000
3	4 6 6 1 6	30 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran	Provsu	50 buku	Terbnyanya Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran	134,990,000	PAD	50 buku	148,500,000
4	4 6 6 1 6	31 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Provsu	50 buku	Terbnyanya Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran	167,780,000	PAD	50 buku	184,558,000
5	4 6 6 1 6	32 Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian Kinerja (PK)	Tersusunnya LAKIP dan Dokumentasi TAPKIN SKPD	Provsu	50 buku	Terbnyanya Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran	131,100,000	PAD	50 buku	145,000,000
6	4 6 6 1 6	33 Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA APBD	Tersusunnya RKA dan DPA SKPD	Provsu	100	Terbnyanya Pengelolaan Anggaran	998,860,540	PAD	100	1,098,746,660
7	4 6 6 1 6	34 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD	Provsu	50 buku	Terbnyanya Pengelolaan Anggaran	277,940,000	PAD	50 buku	305,734,000
8	4 6 6 1 6	35 Penyusunan Laporan Aset Tetap	Tersusunnya Laporan Aset Tetap	Provsu	50 buku	Terbnyanya Pengelolaan Aset	242,779,290	PAD	50 buku	267,058,000
9	4 6 6 1 6	36 Penatausahaan Keuangan SKPD	Terb Administrasi Penatausahaan Keuangan SKPD	Provsu	1 Dinas 35 UPT	Terbnyanya Pengelolaan Anggaran	1,500,000,000	PAD	1 Dinas 35 UPT	2,000,000,000
10	4 6 6 1 6	37 Pembuatan Profil SKPD	Tersedianya Profil SKPD	Provsu	50 buku	Tersosialisasikannya Profil SKPD	150,000,000	PAD	50 buku	165,000,000
11	4 6 6 1 6	38 Evaluasi dan Monitoring serta Verifikasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran	Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring serta Verifikasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran	Provsu	4 kali SPPD Dalam	Terbnyanya Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran	100,000,000	PAD	4 kali SPPD Dalam	150,000,000
12	4 6 6 1 6	39 Pemeriksaan Intern Atas Pengelolaan Keuangan, Barang Kuasa, Berharga Asset/Inventaris Kantor dan Kinerja Pelayanan Pada UPT	Terlaksananya Pemeriksaan Intern Atas Pengelolaan Keuangan, Barang Kuasa, Berharga Asset/Inventaris Kantor dan Kinerja Pelayanan Pd UPT Dispendasu	Provsu	6 kali	Terbnyanya Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran	749,980,000	PAD	6 kali	825,000,000
13	4 6 6 1 6	40 Kajian Banding Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD	Terlaksananya Kajian Banding Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD	Provsu	2 kali	Meningkatnya Kapasitas Aparatur di Bidang Pengelolaan Pendapatan	142,775,613	PAD	2 kali	150,000,000
14	4 6 6 1 6	41 Bimtek Penyusunan RKA/DPA/DPPA APBD	Terlaksananya Bimtek Penyusunan RKA/DPA/DPPA APBD	Provsu	0 kali	Peningkatan Kapasitas Aparatur	200,000,000	PAD	0 kali	250,000,000
15	4 6 6 1 6	42 Penyusunan Data Informasi Publik	Tersusunnya Data Informasi Publik	Provsu	100 buku	Terbnyanya Pengelolaan PAD	100,000,000	PAD	100 buku	150,000,000
16	4 6 6 1 6	43 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD/PAPBD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD/PAPBD	Provsu	2 kali	Terb Administrasi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	128,360,000	PAD	2 kali	145,000,000
17	4 6 6 1 6	44 Sinkronisasi Data LKPD dan LPPD	Tersusunnya LKPD dan LPPD Dispendasu	Provsu	1	Terbnyanya Pengelolaan	47,970,000	PAD	1	60,000,000

3. Program Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya

Bimbingan kebijaksanaan dari program ini merupakan efektifitas serta kemampuan penerapan aktivitas pengurusan PAD dari zona retribusi daerah. Sesuai arah kebijaksanaan serta strategi yang

hendak dicoba, hingga indikator hasil yang diharapkan dari program ini merupakan melonjaknya PAD dari zona retribusi daerah.

IX	4	6	6	1	169	Program Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya	Meningkatnya PAD dari Sektor Retribusi Daerah	Provsu	6%	Meningkatnya PAD dari Sektor Retribusi Daerah	2,238,675,430	PAD	6%	2,550,000,000	
1	4	6	6	1	169	1	Konsultasi dan Konfirmasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumberdaya Alam serta Pendapatan Lainnya	Terlaksananya Konsultasi dan Konfirmasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumberdaya Alam serta Pendapatan Lainnya	Provsu	4 kali	Meningkatnya PAD dari Sektor Retribusi Daerah	451,020,000	PAD	4 kali	500,000,000
2	4	6	6	1	169	2	Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Provsu	2 kali	Meningkatnya PAD dari Sektor Retribusi Daerah	372,230,000	PAD	2 kali	400,000,000
3	4	6	6	1	169	3	Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah	Provsu	2 kali	Meningkatnya PAD dari Sektor Retribusi Daerah	406,550,000	PAD	2 kali	500,000,000
4	4	6	6	1	169	4	Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Lainnya	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Lainnya	Provsu	2 kali	Meningkatnya PAD dari Sektor Retribusi Daerah	412,910,000	PAD	2 kali	500,000,000
5	4	6	6	1	169	5	Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi	Provsu	1 kali	Meningkatnya PAD dari Sektor Retribusi Daerah	87,340,920	PAD	1 kali	100,000,000
6	4	6	6	1	169	6	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Provsu	1 kali	Meningkatnya PAD dari Sektor Retribusi Daerah	116,884,550	PAD	1 kali	150,000,000
7	4	6	6	1	169	7	Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah	Provsu	4 kali	Meningkatnya PAD dari Sektor Retribusi Daerah	97,189,960	PAD	4 kali	100,000,000
8	4	6	6	1	169	8	Penyusunan Sistem Aplikasi Retribusi Daerah	Tersusunnya Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Daerah	Provsu	1 Aplikasi	Meningkatnya PAD dari Sektor Retribusi Daerah	94,450,000	PAD	1 Aplikasi	100,000,000
9	4	6	6	1	169	9	Forum Retribusi Daerah	Terlaksananya Forum Retribusi Daerah	Provsu	1 kali	Meningkatnya PAD dari Sektor Retribusi Daerah	200,000,000	PAD	1 kali	200,000,000

Landasan Hukum Rencana Kerja

Landasan hukum pada kategorisasi Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 meliputi:

1. Undang- undang No 24 Tahun 1956 tentang Pembuatan daerah Independensi Provinsi Aceh serta Pergantian Peraturan Pembuatan Provinsi Sumatera Utara Negara Republik Indonesia No 1103, Peraturan Penguasa No 21 Tahun 1950 mengenai Dearah Provinsi(Kepingan Negara Republik Indonesia No 1959 Tahun 1950)
2. Undang- undang No 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Pemograman Pembangunan Nasional(Badan Negeri Republik Indonesia No 104 Tahun 2004, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4421)
3. Hukum No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Kepingan Negeri Republik Indonesia Tahun 2009 No 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 5049)
4. Hukum No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia No 244 Tahun 2014, tambahan lembaran Negera Republik Indonesia No 5587) begitu juga sudah diganti dalam Peraturan pemerintahan pengganti Hukum No 2 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan daerah (lembaran Negera Republik Indonesia No 246 Tahun 2014 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 5589)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2008 mengenai Jenjang Aturan Metode Kategorisasi, Pengendalian serta evaluasi Penilaian Penerapan Konsep Pembangunan daerah (lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, lembaran tambahan Negara Republik Indonesia No 4817)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang berperan selaku pusat pertanggung dalam pembangunan daerah dengan dipandu oleh kepala satuan kerja berlaku seperti perhitungan pengguna anggaran ataupun pengguna barang. Aspek dalam manajemen pembangunan daerah terwadahi dalam satu ataupun sebagian dasar kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Pandangan itu mencakup, pandangan kategorisasi kebijaksanaan serta koordinasi yang diwadahi dalam wujud sekretariat, pandangan pengawasan yang diwadahi dalam wujud inspektorat, pandangan pemograman diwadahi dalam wujud badan, pandangan faktor pendukung dalam kategorisasi serta penerapan kebijaksanaan daerah yang bersifat spesifik khusus serta diwadahi dalam badan teknis daerah, serta pandangan penerapan hal daerah diwadahi dalam biro dinas daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah ialah salah satu dari dua bagian dalam sistem pemerintahan daerah yang melakukan guna pemerintah serta jasa publik, baik dengan cara langsung atau tidak langsung. Dalam melakukan kewajiban pada satuan kerja perangkat daerah diserahkan hak untuk menggunakan peruntukan anggaran(perhitungan) serta benda ataupun peninggalan yang hendak diperlukan dalam penerapannya. Pemberian hak kuasa itu tidak cuma bermuatan hak untuk menggunakan anggaran, tetapi pula pada bagian peranan ialah Dasar Kegiatan Rencana Kerja wajib menciptakan sasaran kemampuan dari usulan aktivitas pada anggarannya. Anggaran publik yang jadi hak SKPD tidak dikeluarkan tanpa sesuatu tujuan, tetapi terdapat target kemampuan yang wajib di realisasikan yang sepadan dengan konsep kegiatan pada Rencana kerja perangkat daerah. Terkait dengan data finansial, SKPD wajib senantiasa mengenali berapa anggaran publik yang sudah masuk, serta berapa anggaran yang sudah dipakai serta berapa anggaran yang belum dipakai. Wujud tanggungjawab atas penggunaan anggaran publik (perhitungan) itu bukannya pesan pertanggung balasan(SPJ) Surat Pertanggung Jawaban kepada dasar kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, namun berbentuk informasi finansial.

Peraturan Menteri Dalam Negari No 13 Tahun 2006 pasal 10 yang mana dalam pasal menerangkan mengenai kewajiban Pengguna Anggaran (PA) ialah: menyusun RKA- SKPD, menata DPA- SKPD, melaksanakan kegiatan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja atas penerapan perhitungan SKPD yang dibimbingnya, melaksanakan uji atas gugatan serta menginstruksikan pembayaran atas gugatan, melakukan pemungutan pendapatan bukan pajak,

melaksanakan kesepakatan kerjasama dengan pihak lain dalam batasan perhitungan yang sudah diresmikan, menandatangani SPM Standar Pelayanan Minimum, mengatur pinjaman serta piutang yang jadi tanggung jawab SKPD, mengatur benda kepunyaan daerah ataupun kekayaan daerah yang jadi tanggung jawab SKPD, menata serta mengantarkan informasi finansial SKPD dan memantau penerapan perhitungan SKPD serta melakukan tugas- tugas pengguna anggaran ataupun pengguna barang yang bersumber pada daya yang dilimpahkan oleh kepala daerah pada dasar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung atas penerapan tugasnya pada kepala daerah lewat sekretaris daerah.

Kebijaksanaan pemograman Pendapatan Asli daerah dilakukan dengan : Intensifikasi semacam penanganan pajak terutang ataupun perbaikan manajemen pajak daerah, serta pengenaan pajak liberal untuk pemilik alat transportasi bermotor yang mempunyai alat transportasi lebih dari satu serta perihal ini sudah dituangkan dalam wujud penentuan Peraturan daerah No 1 Tahun 2011 mengenai Pajak daerah Provinsi Sumatera Utara Penerapan Pergub No 89 Tahun 2018 bertepatan pada 28 November 2018 mengenai Pemberian Kelapangan Kompensasi PKB atau BBNKB berbentuk:

- a. Pembebasan ganjaran Administrasi atau kompensasi bunga Pajak Kendaraan Bermotor(PKB)
- b. Pembebasan Utama bea balik nama Kendaraan Bermotor buat penyerahan kedua serta berikutnya Peraturan Gubernur itu berlaku untuk wajib Pajak yang melaksanakan registrasi serta pembayaran semenjak bertepatan pada 28 November 2018 s atau d 28 Desember 2018.

Kebijaksanaan pada pemograman anggaran perimbangan dilakukan melalui kenaikan ketepatan informasi dan akurasi data untuk hasil pajak serta bukan pajak dan terdapatnya elastis kalkulasi anggaran peruntukan biasa serta kebijaksanaan pemograman yang lain. Pendapatn wilayah yang legal dicoba dengan mendesak pihak ketiga semacam BUMN yang beralamat di Provinsi Sumatera Utara yang bisa membagikan anggaran community development(pengembangan warga) lewat APBD(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), serta memperjuangkan agar anggaran senantiasa bagi hasil dari produk CPO yang jadi salah satu bagian untuk hasil yang diserahkan pada pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Usaha pada kenaikan sumber pemasukan daerah ditempuh melalui program kenaikan pemasukan daerah dengan berdasar pada Konsep Kegiatan Rencana Kerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 selaku pemaparan dari Konsep Pembangunan Waktu Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023.

Bersumber pada hasil rekonsiliasi (pemulihan) dari data informasi kas umum Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemasukan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.860.984.033.590,97,-(102, 24%) dari sasaran Rp. 5.732.425.486.154,00,-. dengan cara biasa realisasi pemasukan pada tahun 2018 telah berhasil melampaui sasaran yang telah diresmikan, tetapi sedang terdapat sumber pemasukan yang belum dicapai. Rencana penerimaan pendapatan

terhadap sasaran serta realisasi pemasukan Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun perhitungan 2018 begitu juga dituturkan serta dipaparkan dalam tabel berikut :

**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2018**

NO	SUMBER	TARGET	REALISASI	%
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.732.425.486.154,00	5.860.984.033.590,97	102,24
1	Pajak Daerah	5.214.897.141.497,00	5.219.324.543.311,00	100,08
2	Retribusi Daerah	37.595.084.600,00	36.797.978.708,00	97,88
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	318.418.076.295,00	196.502.924.542,00	61,71
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	161.151.183.762,00	408.358.587.029,97	252,83
II	DANA PERIMBANGAN	7.308.143.830.700,00	7.055.134.429.266,00	96,54
1	Dana Bagi Hasil Pajak	530.319.394.900,00	455.531.997.729,00	85,90
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	53.900.320.000,00	58.317.018.988,00	108,19
3	Dana Alokasi Umum	2.629.224.545.000,00	2.629.224.545.000,00	100,00
4	Dana Alokasi Khusus Reguler (Fisik)	352.577.382.000,00	315.558.425.916,00	89,50
5	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	3.742.122.188.800,00	3.596.502.441.633,00	96,11
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.533.902.500,00	8.999.339.098,00	94,39
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	---	---	---
2	Hibah dari PT. Jasa Raharja	4.855.200.000,00	5.389.384.952,00	111,00
3	Hibah dari kelompok masyarakat-Partisipasi pihak ke 3	4.678.702.500,00	3.609.954.146,00	77,16
4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten	---	---	---
5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota	---	---	---
6	Pendapatan Lainnya dari Pengembalian Dana BOS	---	---	---
7	Pengembalian Lainnya dari Pengembalian Dana Hibah	---	---	---
8	Pendapatan lainnya dari SKPD	---	---	---

KESIMPULAN

Rencana Kerja Perangkat daerah RENJA ialah dokumen pemrograman, perencanaan dan perangkat milik daerah dalam kurun durasi satu tahun yang memuat program, aktivitas, posisi serta golongan target yang diiringi dan disertai dengan adanya indikator kinerja dan kemampuan serta pendanaan yang sesuai dengan kewajiban serta fungsi tiap perangkat daerah yang disusun dengan berdasar pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi prinsip tahapan dalam menata RKA perangkat daerah, yang dimana pada jenjang kategorisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah bisa diamati pada bagian ketujuh mengenai aturan metode kategorisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah pasal 125 hingga dengan pasal 135.

Di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah menyesuaikan dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 pasal 129 Hasil formulasi rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah begitu juga diartikan dalam pasal 128, disajikan dengan penataan sangat sedikit yang memuat : pendahuluan , hasil evaluasi atau penilaian pada Rencana Kerja Perangkat Daerah, tujuan serta target sasaran perangkat daerah, dan rencana kerja serta pendanaan perangkat daerah.

Penyusunan Rencana Kerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara disusun selaku materi kategorisasi rancangan pada akhir RKPD Provinsi Sumatera Utara, materi pada forum SKPD ataupun forum dalam serta eksternal pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan, pemograman pembangunan wilayah pada tahun 2020. Konsep Kegiatan ini bisa jadi pegangan untuk semua aparatur di dalam lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan Program serta aktivitas untuk menciptakan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk bisa melakukan kearah kebijaksanaan yang telah diresmikan dalam kategorisasi penyusunan Rencana Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Provinsi Sumatera Utara sehingga Badan Penglolaan Pajak dan Retribusi Daerah Sumatera Utara menata bermacam program serta aktivitas dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana program nya melingkupi kebijaksanaan, memikirkan sumber daya yang terdapat di dalam organisasi, terinci serta seimbang dengan fungsi organisasi. Pemaparan dari program kegiatan rencana kerja ini ialah wujud aktivitas yang di susun dan yang akan dilaksanakan dalam kurun tahunan guna menggapai tujuan serta target dan sasaran dalam terwujudnya visi misi serta tujuan yang telah di tetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Aruan,E. L. (2018, Oktober). Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Provinsi Sumatera Utara, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.sc.id> .

Adisasmita. R. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Bastian, Indra. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Taufik Irwan, 2009, Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Indonesia.

Wahyuningsi, Rutiana D, (2007) Responsibilitas Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Bpprd.sumutprov.go.id